

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Sugiyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Sugiyanto



Yuwono Agung Nugroho

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

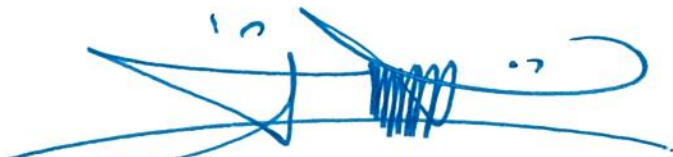
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun/disempurnakan	75%
		b. Persentase aparatur Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengikuti bimbingan teknis administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	90%
		c. Persentase Perkara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	87%
		d. Persentase Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Prodeo	80%
		e. Persentase pencari keadilan yang diberikan layanan Bantuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	77%
2	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase naskah pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun	80%
		b. Persentase tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengikuti bimbingan teknis yustisial	85%
		c. Persentase tenaga teknis yang promosi dan mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	80%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, PK, dan Grasi Pidana Militer, dan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak TUN	Persentase Kegiatan Rekonsiliasi Data Kelengkapan Berkas Administrasi Perkara Kasasi, PK, dan Grasi Pidana Militer, dan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak TUN	85%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Persentase Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilmiltun	85%

Kegiatan**Anggaran**

1. Meningkatnya Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 450.980.000
2. Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 317.140.000
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, PK, dan Grasi Pidana Militer, dan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak TUN Rp. 2.250.000
4. Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 19.428.105.000

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI



Sugiyanto

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara



Yuwono Agung Nugroho